

# NASKAH KEBIJAKAN

## PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DI INDONESIA

Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal



# **NASKAH KEBIJAKAN PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DI INDONESIA**

**Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal**



Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

# **NASKAH KEBIJAKAN PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DI INDONESIA**

**Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal**

**PENERBIT BRIN**



©2025 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Naskah Kebijakan Penguatan Ketahanan Sosial di Indonesia: Program Keresasian Sosial dan Kearifan Lokal/Adrianus Alla, Ibnu Solihin, M Tahir, Rosehan Ansyari, Yustina Suhartiningsih, Indri Astuti, Nanik Nurhayati, Delyance Can, Diky Febrianto, Ainslei Merdekawati, Dwi Putri Pujianingsiharani, Zurheka Seswenti, Mulyadi, Irawati Suhita, Githa Dwi Wulandary, Meydita Puspa Maulana, Indah Aulia Rachmawati, Dyah Ayu Rokhmatul Nisa, Eka Yanti, Ninda Ayu Nurdiana, Helvien Aprilia, Dewi Nainggolan, Nesya Martia Adam, Hernawati, Achmad Fauzi, Ibnu Mahdi, Budhi Gunawan, Abdul Charis, Muhajir, Badrun Susantyo, Johan Arifin, Habibullah, Husmiati, Hari Harjanto Setiawan, Arditya Wicaksono, Eko Wahyono, Gustaf Wijaya – Jakarta: Penerbit BRIN, 2025.

iv+31 halaman, 21 x 29,7 cm

Copy editor : Martinus Helmiawan

Penata isi : Gustaf Wijaya & Dhevi E.I.R. Mahelingga

Desainer sampul : Gustaf Wijaya & Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan pertama: April 2025

Diterbitkan oleh:



Penerbit BRIN, Anggota Ikapi

Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah


Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,


Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Whatsapp: +62 811-1064-6770

E-mail: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)

Website: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)

 PenerbitBRIN

 Penerbit\_BRIN

 Penerbit.brin



## Daftar Isi

PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Program Bantuan Kerasian Sosial .....	3
Program Penguatan Kearifan Lokal .....	3
KERANGKA KONSEP DAN KEBIJAKAN .....	4
Pencegahan konflik dalam perspektif kesejahteraan sosial.....	4
Penguatan ketahanan sosial masyarakat .....	5
Kerasian Sosial.....	6
Kearifan Lokal .....	7
METODOLOGI KAJIAN .....	9
HASIL KAJI CEPAT .....	10
Program Kerasian Sosial.....	10
Capaian Program.....	13
Program Kearifan Lokal .....	15
Tata kelola Pelaksanaan Program.....	19
Perubahan Pendekatan Program Kerasian sosial dan Kearifan Lokal.....	20
Prospek ke Depan .....	23
Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal sebagai Prioritas Kebijakan.....	25
Sinergi dengan Kebijakan Publik Lainnya .....	25
REKOMENDASI KEBIJAKAN .....	26
KESIMPULAN .....	26
REKOMENDASI.....	26
Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan.....	26
Tata Kelola dan Pengawasan .....	26
Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan.....	27
Pengembangan Pendanaan .....	27
Pengembangan Konsep Kearifan Lokal.....	28
Daftar Pustaka.....	30



Kombinasi Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menciptakan harmoni sosial, melestarikan budaya, dan memberdayakan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dengan dukungan semua pihak dan pengelolaan yang baik, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi model keberhasilan pembangunan ketahanan sosial di Indonesia. Perpaduan pelaksanaan Program Keserasian Sosial dan Program Kearifan Lokal di Indonesia, melahirkan harmoni dan kolaborasi masyarakat dalam kedua program tersebut.



# PENDAHULUAN

## ***Latar Belakang***

Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa, baik dari segi budaya, etnis, agama, maupun bahasa. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa yang menjadi identitas unik, tetapi sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Masyarakat layaknya sebuah bangunan yang kokoh, ia membutuhkan fondasi yang kuat agar mampu bertahan di tengah terpaan badai dan guncangan. Fondasi tersebut tak lain adalah ketahanan sosial, sebuah tameng yang melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Di era yang diwarnai dengan arus globalisasi yang deras, perubahan sosial yang cepat, dan berbagai tantangan kompleks lainnya, penguatan ketahanan sosial masyarakat menjadi agenda yang kian mendesak.

Ketahanan sosial bukan sekadar kemampuan untuk bertahan hidup, melainkan juga kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkembang di tengah perubahan. Ia merupakan modal utama bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan, mulai dari bencana alam, konflik sosial, krisis ekonomi, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan.

Ketahanan sosial masyarakat merupakan kemampuan suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk mengatasi tekanan dan gangguan eksternal yang muncul akibat perubahan sosial, politik, dan lingkungan (Laborda et al., 2023). Ketahanan sosial ini sangat penting untuk mempertahankan fungsi, struktur, identitas, dan input masyarakat agar tetap utuh dalam menghadapi berbagai tantangan (Fatmawati & Dewantara, 2022).

Beberapa faktor yang dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat antara lain jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut bersama merupakan modal sosial dan menjadi komponen penting dalam membangun ketahanan masyarakat (Aldrich & Meyer, 2014). Modal sosial yang kuat dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama dalam menghadapi tantangan (Zuñiga & Villoria, 2019). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama sehingga memperkuat ketahanan sosial (Nava, 2023). Peran pemimpin sosial yang efektif dapat memobilisasi sumber daya dan memfasilitasi kerja sama di dalam masyarakat, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan maupun ancaman (Valizadeh et al., 2022). Pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan kearifan lokal, dan membangun jaringan



kelembagaan terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat salah satu contohnya adalah desa berketahanan sosial (Mujiyadi et al., 2023).

Faktor penting lainnya adalah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dapat menjadi sumber kekuatan dan adaptasi dalam menghadapi perubahan (Saefudin, 2023). Kerjasama dan koordinasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya dapat menciptakan platform yang mendukung ketahanan sosial masyarakat (Nava, 2023). Penguatan ketahanan sosial masyarakat membutuhkan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan sumber daya serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat (Alfirdaus et al., 2021). Salah satunya melalui Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam (PSKBSNA) Kementerian Sosial RI. Program Kementerian Sosial ini adalah program penguatan warga masyarakat melalui keserasian sosial dan kearifan lokal pada kelompok masyarakat rawan konflik sosial dan radikalisme.

Konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah tidak hanya mengancam stabilitas nasional, tetapi juga merusak kohesi sosial yang telah terbentuk. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Sosial meluncurkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan ketahanan sosial, di antaranya melalui Program Bantuan Keserasian Sosial dan Penguatan Kearifan Lokal. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan yang telah ditetapkan, di antaranya:

- 1) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial**, yang menjadi dasar utama dalam menangani konflik sosial di Indonesia.
- 2) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**, yang menjadi payung hukum bagi program-program peningkatan kesejahteraan dan harmoni sosial.
- 3) **Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017** tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, yang mengarahkan pencegahan konflik melalui pendekatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal.

Landasan hukum ini menggarisbawahi pentingnya penguatan hubungan harmonis antar anggota masyarakat, khususnya di wilayah rawan konflik atau wilayah pascakonflik, agar dapat mencegah terulangnya konflik di masa mendatang.



## ***Program Bantuan Keresasian Sosial***

Program ini bertujuan menciptakan relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati. Dalam implementasinya, Kementerian Sosial membentuk **Forum Keresasian Sosial**, yang berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan potensi konflik secara dialogis. Bantuan berupa dana stimulan disalurkan untuk mendukung kegiatan yang memperkuat solidaritas masyarakat, seperti perbaikan fasilitas umum, pelatihan keterampilan, dan kampanye perdamaian.

Keresasian sosial ini tercantum dalam **Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah**, khususnya pada proyek prioritas “Penanganan Konflik secara Humanis.” Program ini dirancang agar masyarakat mampu mengelola konflik pada skala kecil di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan, sehingga konflik tidak berkembang menjadi masalah besar yang mengancam stabilitas wilayah.

## ***Program Penguatan Kearifan Lokal***

Indonesia kaya akan kearifan lokal yang tercermin dalam tradisi, adat, dan budaya di setiap daerah. Program Penguatan Kearifan Lokal dirancang untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya tersebut sebagai modal sosial dalam mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat adat, seniman lokal, komunitas budaya dan komunitas lainnya untuk mengembangkan kegiatan yang berbasis kearifan lokal.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun identitas lokal yang kuat sekaligus memperkuat rasa saling memiliki antar anggota masyarakat. Sebagai contoh, upacara adat atau festival budaya yang melibatkan berbagai kelompok dapat menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga di wilayah yang rawan konflik.



# KERANGKA KONSEP DAN KEBIJAKAN

## *Pencegahan konflik dalam perspektif kesejahteraan sosial*

Konflik dalam upaya harmonisasi sosial memiliki dampak signifikan terhadap program penguatan ekonomi berkelanjutan, terutama melalui mekanisme penurunan kepercayaan sosial (*social trust*) dan peningkatan biaya transaksi ekonomi. Menurut penelitian Collier et al. (2012), konflik sosial dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 2–3% per tahun melalui efek *multiplier* yang meliputi kerusakan aset produktif, penurunan investasi, dan terganggunya rantai nilai ekonomi. Hal ini diperkuat oleh studi longitudinal yang dilakukan Varshney (1993) di berbagai negara berkembang, yang menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat konflik sosial tinggi mengalami hambatan serius dalam implementasi program pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama karena menurunnya partisipasi masyarakat dan melemahnya kohesi sosial yang diperlukan untuk kolaborasi ekonomi.

Di sisi lain, program penguatan ekonomi berkelanjutan yang dirancang dengan baik dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi konflik sosial dan meningkatkan harmonisasi masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Hillesund et al. (2018), menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan partisipatif berkorelasi positif dengan peningkatan harmoni sosial, dengan koefisien korelasi sebesar 0.67. Temuan ini sejalan dengan penelitian Patel dan Kumar (2022) yang menganalisis 150 program pembangunan ekonomi di Asia Tenggara, di mana program-program yang memperhatikan aspek keadilan distribusi dan melibatkan berbagai kelompok sosial dalam perencanaan dan implementasinya terbukti dapat menurunkan intensitas konflik sosial hingga 45% dalam periode 5 tahun. Khususnya, program-program yang mengintegrasikan pendekatan *bottom-up* dengan penguatan kelembagaan lokal menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menciptakan harmoni sosial sambil tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pencegahan konflik dalam perspektif kesejahteraan sosial merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Konflik sering kali muncul akibat ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan perbedaan budaya yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab konflik dan upaya pencegahannya menjadi sangat krusial. Salah satu konsep dasar dalam pencegahan konflik adalah pemahaman bahwa konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan pendapat, tetapi juga sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil. Menurut Galtung (1996), konflik dapat dipicu oleh ketidakadilan struktural, yaitu ketika sumber daya dan kekuasaan tidak didistribusikan secara merata. Dalam konteks ini, pencegahan konflik harus melibatkan upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan inklusi bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam pencegahan konflik. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi dan keberagaman dapat membantu



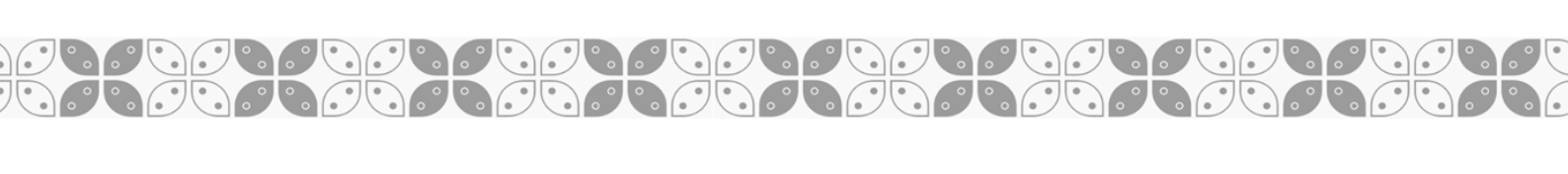
membangun pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok. Lederach (1995) menekankan pentingnya pendidikan perdamaian sebagai alat untuk membangun hubungan yang saling menghormati. Dengan meningkatkan kesadaran akan keberagaman, diharapkan masyarakat dapat mengurangi prasangka dan stereotip yang sering menjadi penyebab konflik.

Pemberdayaan ekonomi juga merupakan aspek penting dalam pencegahan konflik. Sen (1999) dalam teorinya tentang pembangunan manusia menekankan bahwa peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat mengurangi ketimpangan dan mencegah konflik. Program-program yang memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membantu menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Selain itu, penguatan jaringan sosial di masyarakat sangat penting untuk menciptakan solidaritas dan kepercayaan. Putnam (2000) menyatakan bahwa jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dengan membangun forum-forum dialog, masyarakat dapat berdiskusi dan mencari solusi bersama untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam implementasinya, kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, NGO, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan. Fisher dan Ury (1991) menekankan pentingnya negosiasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan konflik. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan pencegahan konflik dapat diterapkan secara lebih efektif.

### ***Penguatan ketahanan sosial masyarakat***

Penguatan ketahanan sosial masyarakat adalah suatu upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis. Ketahanan sosial mencakup aspek-aspek seperti solidaritas, kepercayaan antar anggota masyarakat, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan pandemi, penting bagi masyarakat untuk memiliki ketahanan yang kuat agar dapat bertahan dan berkembang. Salah satu elemen kunci dalam penguatan ketahanan sosial adalah pendidikan. Pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan karakter dapat membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Menurut Bennett dan Mook (2022), pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai sosial dan kolaborasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya solidaritas dan kerja sama dalam menghadapi masalah bersama.

Selain pendidikan, pemberdayaan ekonomi juga berperan penting dalam ketahanan sosial. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, mereka akan lebih mampu mengatasi krisis. Fischer dan Kauffman (2021) menunjukkan bahwa program-program yang mendukung usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada ketahanan



sosial. Penguatan jaringan sosial di komunitas juga sangat penting. Jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya. Putnam (2000) mengemukakan bahwa masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang baik cenderung lebih adaptif dalam menghadapi tantangan. Forum-forum komunitas yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar anggota masyarakat dapat membantu memperkuat hubungan sosial dan menciptakan rasa saling percaya. Dalam implementasinya, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga sangat penting. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosial mereka. Murray dan Kearns (2023) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap upaya penguatan ketahanan sosial

### ***Keserasian Sosial***

Program Keserasian Sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting: menciptakan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan saling menghormati. Dalam konteks keberagaman budaya, etnis, dan agama yang ada di Indonesia, keserasian sosial menjadi landasan yang esensial untuk mencegah konflik dan mempromosikan kohesi sosial di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, program ini berperan vital dalam menjaga keutuhan dan stabilitas sosial di negara yang kaya akan keragaman ini.

Dasar hukum dari program Keserasian Sosial diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya menciptakan keserasian sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan perlunya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan penguatan keserasian di tingkat lokal. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis yang jelas dalam pelaksanaan program ini.

Konsep dasar dari program Keserasian Sosial mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah pendidikan dan penyuluhan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Melalui pelatihan, seminar, dan kampanye, masyarakat diharapkan dapat memahami nilai-nilai keserasian sosial yang menjadi fondasi bagi hubungan antarindividu dan antarkelompok. Dialog antarbudaya juga menjadi salah satu komponen kunci dalam program ini. Kementerian Sosial mendorong dialog sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan saling pengertian di antara berbagai kelompok masyarakat. Forum-forum dialog ini berfungsi sebagai platform untuk mendiskusikan isu-isu sosial dan mencari solusi bersama, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, pemberdayaan komunitas menjadi fokus penting lainnya, di mana masyarakat dilibatkan



dalam proses pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan sosial di lingkungan mereka.

Penguatan jaringan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat sangat penting untuk menciptakan solidaritas. Program ini berupaya memperkuat hubungan antar individu melalui kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga memastikan efektivitas program ini. Dengan semua upaya tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih damai dan bersatu dalam keberagamannya, menciptakan masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga saling mendukung dalam mencapai keserasian sosial.

Berdasarkan hasil analisis biaya manfaat pada program Keserasian Sosial, ditemukan bahwa program ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat sosial yang signifikan, seperti mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan harmoni sosial, dan memperkuat hubungan antar individu dan kelompok (Permana et al., 2024).

### ***Kearifan Lokal***

Program Kearifan Lokal yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan nilai-nilai budaya serta tradisi yang ada di masyarakat. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam program sosial, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. Dasar hukum dari program Kearifan Lokal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal dalam pembangunan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga memberikan landasan hukum bagi upaya pelestarian dan pengembangan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas budaya nasional. Peraturan-peraturan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia.

Konsep dasar dari program Kearifan Lokal mencakup beberapa aspek penting. Pertama, program ini berfokus pada penguatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. Kementerian Sosial mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal, seperti seni, kerajinan, dan tradisi adat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan mereka dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya yang ada. Kedua, program ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Misalnya, dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal dalam pariwisata, produk kerajinan, dan pertanian, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.



Kementerian Sosial berupaya menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal, sehingga keduanya dapat saling mendukung.

Ketiga, program Kearifan Lokal juga melibatkan pendidikan dan penyuluhan. Melalui kegiatan ini, generasi muda diajarkan tentang pentingnya kearifan lokal dan bagaimana meneruskan nilai-nilai tersebut ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, diharapkan kearifan lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diadaptasi dalam konteks modern, sehingga tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dengan dasar hukum yang jelas dan konsep yang terintegrasi, program Kearifan Lokal Kementerian Sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya bersama untuk menghargai dan melestarikan kearifan lokal, Indonesia dapat menjaga identitas budaya bangsa sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.



## METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam melihat proses dan dapat melakukan pengukuran terhadap suatu variabel atau tindakan sosial (Creswell & Crerswell, 2018). Penelitian ini mengkaji proses dan evaluasi program keserasian sosial dan kearifan lokal yang sudah di implementasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Metode campuran kualitatif dan kuantitatif ini menghasilkan data komprehensif mengenai bagaimana proses program keserasian sosial dan kearifan lokal dilakukan oleh pengurus, *stakeholder* terkait dan penerima manfaat.

Kajian cepat ini dilakukan di Sumatra Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Ke enam lokasi ini merupakan kawasan dan lokus program keserasian sosial dan kearifan lokal dilakukan pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu minggu kedua dan minggu ke tiga di bulan Desember 2024. Informan pada penelitian ini adalah penerima manfaat, kepala desa/kepala nagari, camat, tokoh masyarakat, datuk, pengurus program keserasian sosial dan kearifan lokal. Validitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi narasumber, waktu dan data. Data yang didapatkan dari informan akan dikonfirmasi dengan data dari informan lain, dari data sekunder yang sudah serta dikonfirmasi ulang dengan rencana awal program. Data penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (Neuman 2014). Data mengenai pelaksanaan program keserasian sosial dikumpulkan, direduksi, dianalisis dan disimpulkan secara interaktif dan dialogis.





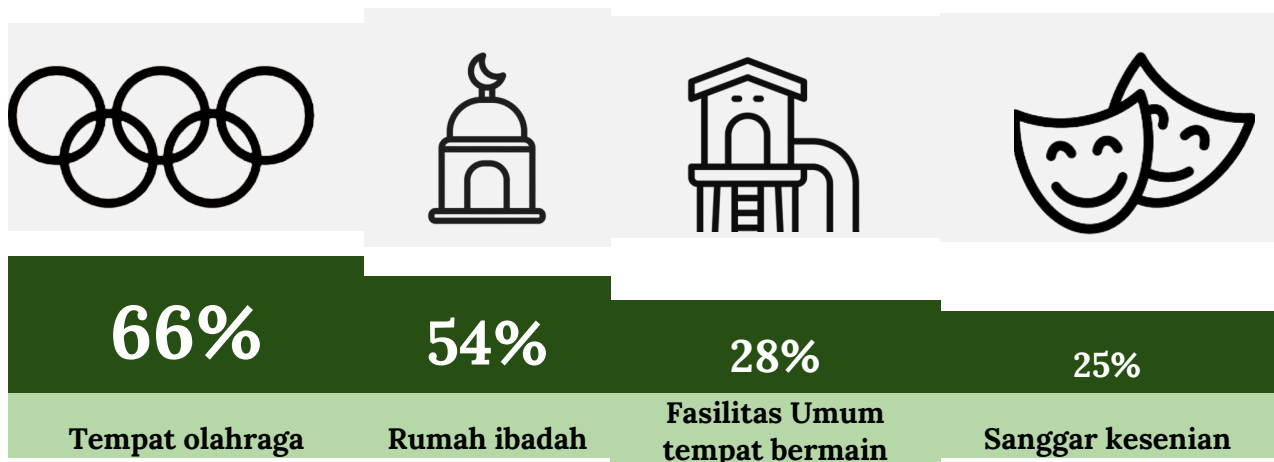
## HASIL KAJI CEPAT

Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal adalah dua inisiatif strategis yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kedua program ini memiliki tujuan yang saling melengkapi, yaitu menciptakan harmoni sosial, melestarikan kearifan lokal, dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Berikut adalah uraian detail tentang pelaksanaan kedua program tersebut di enam provinsi utama: Sumatra Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten dengan menyoroti perbedaan pendekatan di setiap wilayah.

### *Program Keserasian Sosial*

Di Provinsi Sumatra Barat, Program Keserasian Sosial difokuskan pada upaya memperkuat harmoni antar warga melalui kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Khusus di Kota Padang, forum komunikasi masyarakat digunakan untuk membahas isu-isu lokal, seperti potensi konflik akibat perbedaan pandangan politik dan ekonomi. Forum ini memfasilitasi dialog terbuka yang berfokus pada resolusi masalah secara damai, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah lokal.

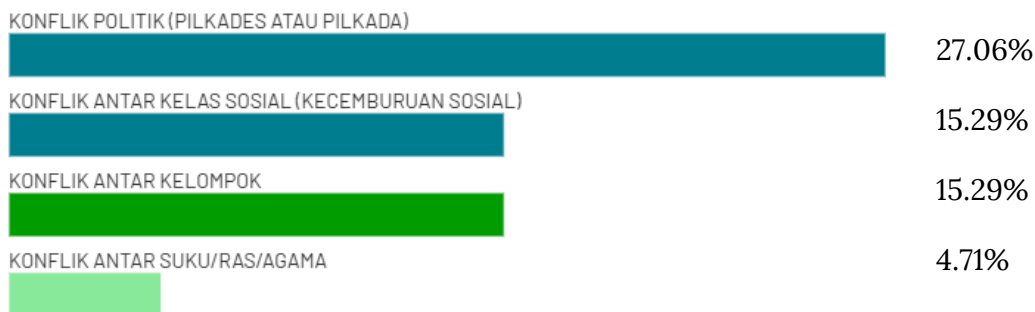
Salah satu contoh implementasinya adalah pembangunan lapangan olahraga dan penyelenggaraan turnamen futsal antar warga di Kabupaten Agam. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik masyarakat tetapi juga mendorong interaksi sosial lintas generasi. Data dalam kaji cepat ini menunjukkan bagaimana sarana olahraga menjadi arah yang paling diminati oleh kelompok keserasian sosial (66%), berikutnya diikuti oleh rumah ibadah (54%), tempat bermain anak (28%), dan sanggar kesenian (25%) sebagaimana pada Gambar 1. Presentasi didasarkan pada jawaban seluruh responden, kemudian diambil empat persentasi terbesar.



Gambar 1. Fasilitas Publik yang Paling Diminati oleh Responden di Enam Lokasi Program Keserasian Sosial

Di Yogyakarta, Program Keresasian Sosial lebih menekankan pada penguatan ruang-ruang publik sebagai wadah interaksi sosial. Salah satu contohnya adalah pembangunan Pendopo Agung di Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Pendopo ini menjadi pusat berbagai kegiatan komunitas, seperti pertemuan warga, diskusi masyarakat, hingga acara adat.

Kelurahan Panggungharjo memiliki keberagaman sosial yang tinggi, baik dari segi budaya maupun status ekonomi. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mencegah potensi konflik melalui kegiatan komunikasi dan mediasi yang dilakukan di pendopo. Tokoh masyarakat dan pemuda sering memanfaatkan pendopo ini untuk membahas isu-isu lokal dan mencari solusi bersama, seperti masalah keamanan lingkungan atau perbedaan pandangan politik. Adapun gambaran konflik yang terjadi di tengah masyarakat utamanya pada lokus kaji cepat dapat dilihat pada Gambar 2.

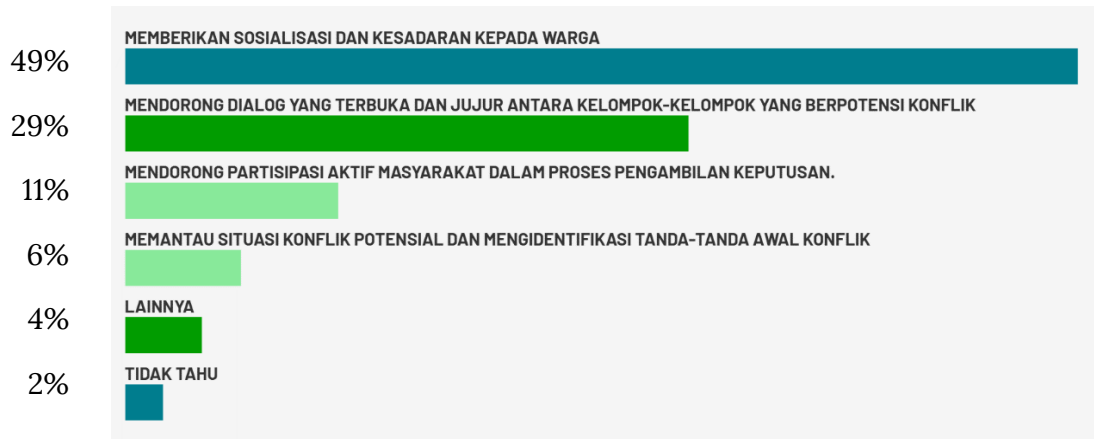


Gambar 2. Potensi Konflik pada Lokus Program Keresasian Sosial

Potensi konflik terbesar adalah konflik politik, baik dalam jangkauan desa dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa maupun kepala daerah pada tingkat kabupaten (27,06%). Diikuti berikutnya dengan potensi konflik kelas sosial (15.29%), potensi konflik antarkelompok (15.29%) serta potensi konflik antar-ras, suku, ataupun agama (4.71%). Di Kabupaten Banyumas, Program Keresasian Sosial diterapkan melalui pembangunan lapangan futsal di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan ruang interaksi sosial yang positif bagi pemuda desa, yang sebelumnya harus pergi jauh untuk bermain futsal.

Lapangan futsal ini tidak hanya menjadi sarana olahraga tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat lintas usia untuk berinteraksi dan memperkuat solidaritas. Program ini melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan hingga pembangunan, yang dilakukan secara gotong royong. Dengan demikian, program ini berhasil meningkatkan partisipasi warga dan mempererat hubungan sosial di desa tersebut.

Kaji cepat ini juga menangkap beberapa arah upaya pencegahan konflik sosial di masyarakat, yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Upaya Pencegahan Konflik di Enam Lokasi Program Kereserasian Sosial

Di Kabupaten Lebak, Program Kereserasian Sosial berfokus pada pembangunan fasilitas publik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Salah satu inisiatif utamanya adalah pembangunan lapangan terbuka yang menjadi pusat kegiatan olahraga, diskusi komunitas, dan acara budaya. Proyek ini bertujuan menciptakan ruang bersama yang dapat memperkuat hubungan antar warga, khususnya di wilayah yang memiliki keberagaman etnis dan agama.

Proses pelaksanaan proyek melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan perangkat desa. **Gotong royong menjadi inti dari keberhasilan program ini.** Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Kereserasian Sosial membantu mengurangi potensi konflik sosial, terutama di daerah yang sering menghadapi tantangan seperti kecemburuan sosial terkait distribusi bantuan. Hasilnya, masyarakat merasakan manfaat nyata dari program ini. Fasilitas yang dibangun tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga simbol keberhasilan warga dalam menjaga harmoni sosial.

Di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pelaksanaan Program Kereserasian Sosial mencakup pembangunan jalan beton sepanjang 700 meter yang menghubungkan dua kampung. Sebelum adanya jalan ini, warga menggunakan jalan setapak yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Jalan beton ini memudahkan pengangkutan hasil pertanian dan aktivitas warga sehari-hari.

Pembangunan dilakukan melalui gotong royong, dengan warga menyumbangkan tenaga kerja dan sebagian lahan untuk pelebaran jalan. Program ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur desa tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga melalui kerja sama yang intensif. Forum Kereserasian Sosial memimpin proyek ini, memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, pelaksanaan Program Kereserasian Sosial berfokus pada pembangunan jalan penghubung antarkampung sepanjang 300 meter. Sebelum adanya jalan ini, warga hanya memiliki jalan setapak tanah yang sulit diakses, terutama saat musim hujan. Proyek ini memberikan

dampak besar terhadap mobilitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah, petani yang mengangkut hasil panen, dan pedagang lokal.

Proyek ini dipimpin oleh Forum Keserasian Sosial (FKS) Ar Rumi yang dibentuk oleh pemerintah desa. Pelaksanaannya melibatkan gotong royong warga desa yang menyumbangkan tenaga, material, dan waktu. Selain itu, kepala desa dan tokoh masyarakat aktif menggalang dukungan, memastikan semua pihak terlibat. Pembangunan jalan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga simbol kolaborasi warga dalam menciptakan harmoni sosial.

Hasil dari program ini terasa langsung oleh masyarakat. Warga merasa lebih terhubung, kegiatan ekonomi meningkat, dan rasa memiliki terhadap desa mereka semakin kuat. Kegiatan sosialisasi yang diadakan selama proyek ini juga mendorong dialog komunitas, memitigasi potensi konflik sosial di tengah keberagaman pandangan dan latar belakang warga.

### Capaian Program

Survei yang dilakukan dengan melibatkan sebanyak 131 penerima manfaat Program Keserasian Sosial, terkait manfaat program persebarannya dapat dilihat pada tampilan grafik berikut ini.



#### KEMANFAATAN

Secara umum, kelompok penerima manfaat memperlihatkan rerata skor 9,13 dari 10. Sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat dan kelompok penerima manfaat melihat program Keserasian Sosial sangat baik kemanfaatannya.



#### PENINGKATAN PEMAHAMAN

Angka sedikit lebih rendah namun cukup baik diperlihatkan dari rerata kemanfaatan, yakni 8,23.



#### PENINGKATAN KESADARAN

Aspek peningkatan kesadaran juga menjadi nilai yang cukup baik namun di bawah nilai kemanfaatan secara umum.

Score  8.77

Score  9.14

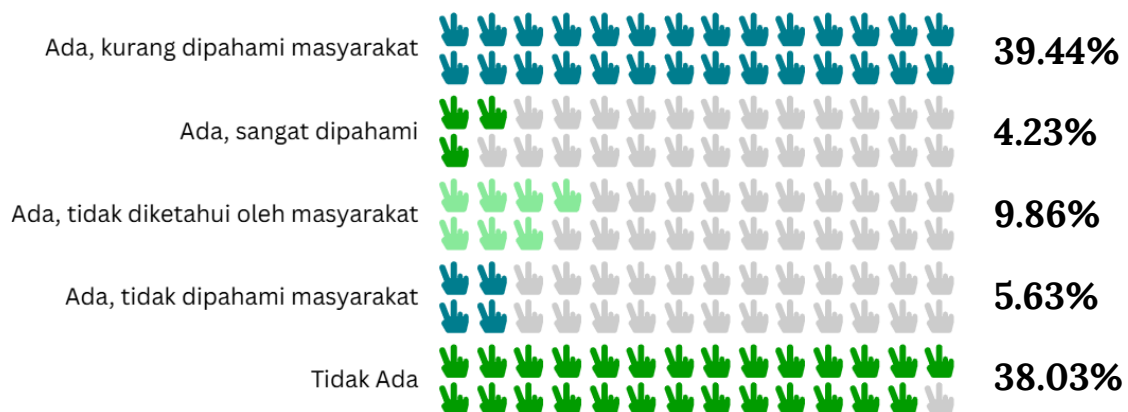
### PENINGKATAN KOMITMEN

Data memperlihatkan masyarakat cukup merasakan manfaat dari program keserasian sosial, namun aspek kesadaran atas keharmonisan dalam keberagaman sosial masih perlu menjadi perhatian.

### PENINGKATAN KEBERSAMAAN

Angka tertinggi dari rangkaian penilaian ini terletak pada peningkatan kebersamaan yang dirasakan oleh kelompok penerima manfaat dan warga sekitar. **Program keserasian sosial dan bantuan yang diwujudkan menunjukkan dampaknya terhadap peningkatan kebersamaan warga.**

Pada Gambar 4, dapat dilihat indikator terkait sisi lain dari Program Keserasian sosial. Data ini menunjukkan jawaban atas pertanyaan peran forum keserasian sosial dalam perspektif masyarakat. Sebanyak 39,44% responden menjawab ada peran dari forum KS tetapi kurang dipahami masyarakat, sedangkan 38,03% lainnya menyatakan **tidak ada** peran forum keserasian sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, sisanya melihat forum KS ada dengan beragam situasi, seperti ada, sangat dipahami; ada, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat; dan ada, tetapi tidak dipahami masyarakat. Fakta ini dapat dimaknai sebagai sebuah indikasi di mana sosialisasi atas pemahaman masyarakat terhadap program keserasian sosial patut menjadi perhatian. Walaupun, secara skala kemanfaatan, sudah diakui sangat baik, dengan nilai 9,13 dari 10.

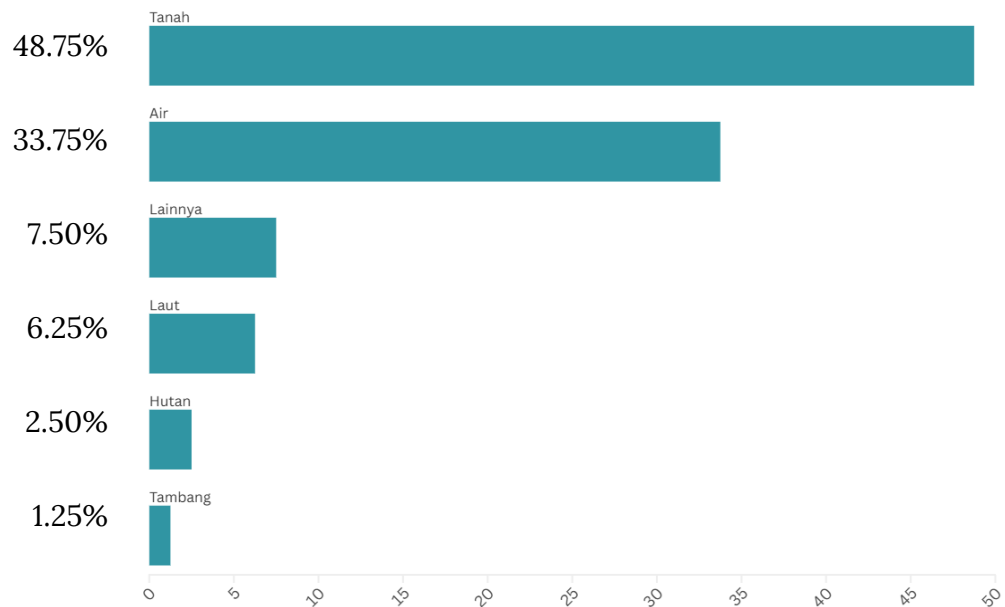


Gambar 4. Peran Forum Keserasian Sosial di 6 Enam Lokasi

## Program Kearifan Lokal

Program Kearifan Lokal di Sumatra Barat difokuskan pada pemberdayaan ekonomi berbasis budaya. Contoh nyata terlihat pada pengembangan usaha kecil seperti produksi kerupuk melinjo di Kabupaten Agam dan budi daya ikan di Kota Padang. Program ini memberikan bantuan berupa peralatan, pelatihan, dan akses pasar untuk mendorong keberlanjutan usaha lokal. Festival budaya yang mengintegrasikan seni tari tradisional, musik Minang, dan kuliner khas menjadi bagian penting dari program ini. Festival ini tidak hanya menjadi sarana promosi produk lokal tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Meskipun berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga kualitas produk dan keberlanjutan usaha.

Dalam kaji cepat ini, didapatkan fokus potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh lokus penerima manfaat pada umumnya berfokus pada tanah (48.75%) dan air (33.75%). Adapun potensi lokal lainnya adalah hutan (2,50%), laut (6,25%), tambang (1,25%) dan lainnya (7,50%). Potensi Sumber Daya yang ada menjadi cerminan bagaimana di lapangan, program kearifan lokal diperlukan untuk menjaga harmoni sumber daya yang ada dengan dinamika sosial masyarakat setempat. Jawaban ini didapat dari 87% responden yang mengaku memahami potensi sumber daya setempat.

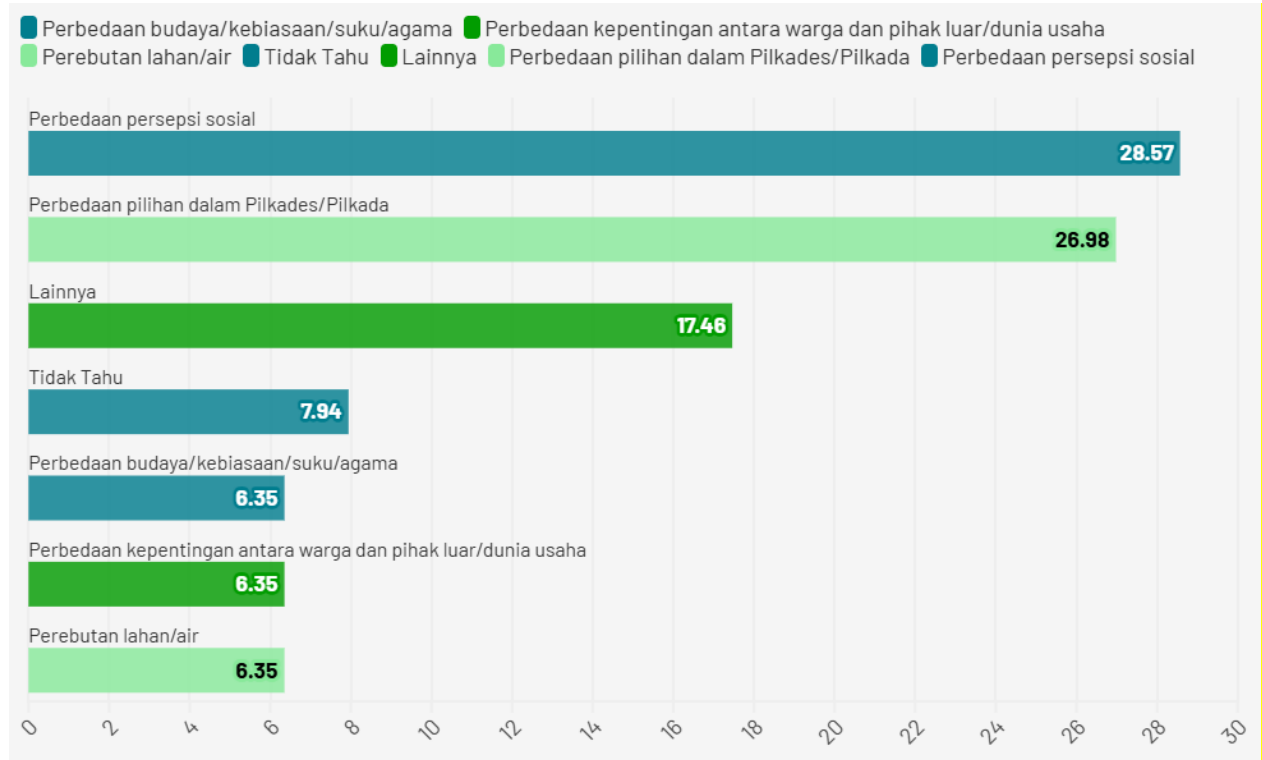


Gambar 5. Potensi Sumber Daya Lokal pada Lokus Penerima Manfaat Program Kearifan Lokal di Enam Lokasi

Di Kabupaten Gunung Kidul, program ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kelurahan Sumberejo dan Candirejo. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan menggunakan dana untuk mengembangkan usaha kecil, seperti penjualan mie ayam, pembuatan arang, dan dagangan kerupuk.



Program ini juga memanfaatkan kearifan lokal sebagai basis solidaritas sosial. Sebagai contoh, usaha mie ayam yang dibantu berhasil meningkatkan omzet dan menciptakan ruang interaksi sosial, di mana warga sering berkumpul di warung tersebut untuk berbagi cerita dan berdiskusi. Namun, salah satu kendala adalah kurangnya pemahaman penerima manfaat tentang tujuan strategis program, sehingga edukasi lebih lanjut diperlukan.



Gambar 6. Potensi Konflik Sosial pada Enam Lokasi Program Keresasian Sosial

Masyarakat dan Kelompok Penerima Manfaat tampak cukup memahami situasi dan dinamika sosial setempat. Sebagaimana terlihat pada Gambar 6, persoalan persepsi sosial (28,57%), dan kontestasi demokrasi pada tingkat lokal (26,98%), menjadi potensi konflik yang perlu diantisipasi. Di samping itu, Program Kearifan Lokal di Banyumas, misalnya, juga mendukung pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal. Pendekatan program ini serupa dengan daerah lain, yaitu mendukung usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan potensi lokal. Selain itu, kegiatan budaya seperti pelatihan seni tari dan kerajinan lokal sering diadakan untuk melibatkan generasi muda dalam melestarikan tradisi daerah. Hal ini menjadi upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sekaligus meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap identitas mereka.

Di Banten, Program Kearifan Lokal mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tangan dan makanan tradisional. Bantuan diberikan kepada 10 pelaku usaha kecil, membantu mereka membeli peralatan atau bahan baku untuk mengembangkan bisnis mereka.

Program ini juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan budaya lokal, memastikan tradisi seperti kerajinan dan kuliner khas tetap relevan di tengah modernisasi. Dengan

dukungan dari pemerintah desa, program ini berhasil meningkatkan pendapatan penerima manfaat sekaligus menciptakan kebanggaan di kalangan warga terhadap warisan budaya mereka.

Di Desa Sindang Asih, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Program Kearifan Lokal ini mendukung usaha kecil seperti kerajinan sangkar burung dan produksi makanan ringan. Bantuan berupa peralatan usaha memungkinkan penerima manfaat meningkatkan produktivitas mereka. Desa ini juga dikenal sebagai pusat kerajinan sangkar burung, yang menjadi ikon lokal sekaligus sumber pendapatan utama warga.

Melalui program ini, nilai budaya dan kearifan lokal dipromosikan, menciptakan kebanggaan di kalangan warga. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas lokal sebagai elemen penting harmoni sosial.

Di Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, program ini mendukung pengembangan usaha mikro berbasis kearifan lokal. Bantuan senilai Rp5 juta per penerima diberikan kepada sepuluh pelaku usaha kecil, seperti tambal ban, warung makan, dan usaha kuliner lokal. Bantuan ini digunakan untuk membeli peralatan usaha seperti kompresor, etalase, atau bahan baku makanan.

Program ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai-nilai lokal seperti kebersamaan dan gotong royong. Kelompok masyarakat Guyub Rukun yang menerima bantuan ini menunjukkan keberhasilan program dengan meningkatnya pendapatan usaha mereka. Selain itu, program ini mendorong sinergi antara masyarakat dan pemerintah lokal, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif.

Program Kearifan Lokal pada periode tahun anggaran 2024 mendapatkan skor kemanfaatan 8,98 dari 10. Skor ini cukup baik, tetapi sedikit di bawah dari nilai program Keserasian Sosial. Meskipun memiliki skor di bawah keserasian sosial, tetapi program kearifan lokal memiliki manfaat nyata bagi penerima manfaat. Manfaat utama yang dirasakan oleh penerima program adalah peningkatan pendapatan ekonomi. Program kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, pengetahuan dan jaringan sosial lokal. Sumberdaya lokal seperti singkong, melinjo dan mete di olah untuk menjadi produk yang mampu di jual pada raung lingkup UMKM. Program Kearifan lokal secara umum mampu menghimpun ikatan sosial di antara penerima manfaat dan mengembangkan ekonomi lokal.

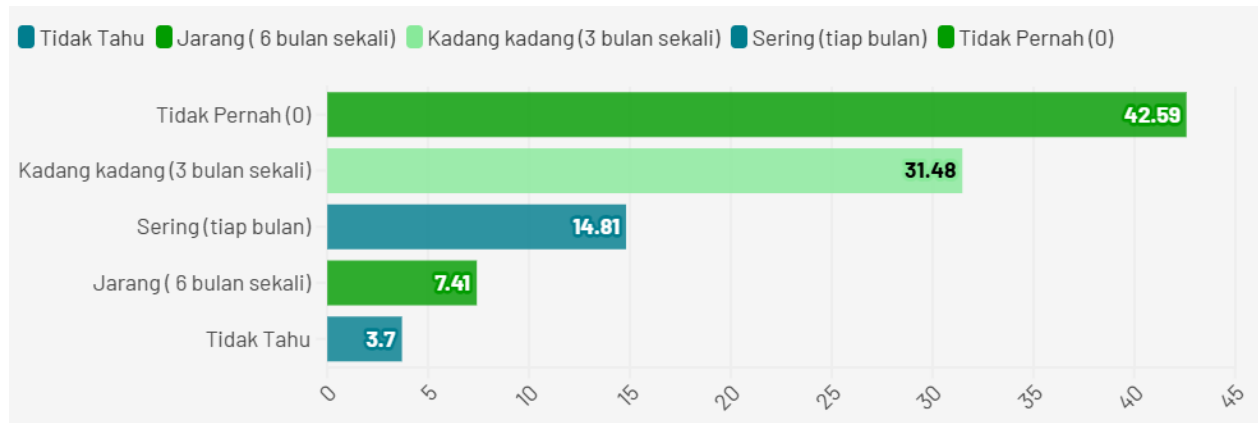






Gambar 7. Skor Program Kearifan Lokal/Naikkan ke Atas

Salah satu titik yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana intensitas dialog kelompok kearifan lokal dengan warga yang kurang. Sebanyak 42% responden mengaku tidak pernah melakukan dialog, 7% mengaku jarang, 31% mengaku kadang-kadang dan hanya 14% mengaku sering melakukan dialog dengan warga setempat pada lokus kelompok penerima manfaat.



Gambar 8. Intensitas Dialog Pertemuan Kearifan Lokal

Meskipun ikatan dan intensitas komunikasi di antara penerima manfaat dengan pihak eksternal (bukan penerima manfaat) cukup rendah akan tetapi intensitas sesama penerima manfaat sangat tinggi. Hal ini cukup wajar karena relasi sosial akan terbentuk dan terjaga secara intens jika sebuah komunitas atau masyarakat memiliki tujuan yang sama.

### **Tata kelola Pelaksanaan Program**

Untuk mengubah kebijakan yang menggunakan pendekatan terpusat menjadi berbasis teknokratik, langkah pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang ada, mengidentifikasi masalah, dan mendefinisikan ulang tujuan kebijakan dengan fokus pada hasil yang ingin dicapai. Pengumpulan data dan bukti empiris menjadi kunci dalam proses ini, di mana data yang relevan dan terpercaya harus dikumpulkan melalui survei, penelitian, atau analisis statistik. Selain itu, penting untuk melibatkan para ahli dan pakar dari berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknik, untuk memberikan masukan teknis yang mendalam. Proses ini juga harus melibatkan konsultasi publik untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, meskipun keputusan akhir harus tetap didasarkan pada analisis yang objektif dan berbasis bukti.

Setelah data dan masukan teknis terkumpul, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan yang rasional dan efektif, dengan mempertimbangkan hasil analisis dan rekomendasi dari para ahli. Jika memungkinkan, kebijakan dapat diuji coba melalui *pilot project* untuk mengevaluasi efektivitasnya sebelum diimplementasikan secara luas. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dengan memastikan proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat diakses oleh publik, serta dengan menetapkan mekanisme evaluasi dan *monitoring* yang jelas. Sosialisasi dan edukasi juga penting untuk menjelaskan dasar-dasar teknis dan ilmiah di balik kebijakan baru kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum, sehingga mereka memahami manfaat dari pendekatan teknokratik.

Terakhir, untuk memastikan keberlanjutan pendekatan teknokratik, perlu dibangun dukungan melalui semua pemangku kepentingan yang mendukung kebijakan berbasis data. Advokasi kepada pembuat keputusan juga diperlukan untuk mengubah paradigma dari pendekatan *top down* ke teknokratik kombinasi *top down* dan *bottom up approach*. Perubahan struktural dalam lembaga pemerintah, seperti pelibatan lembaga independen yang bertugas memberikan rekomendasi berbasis data, dapat membantu “institusionalisasi” pendekatan ini. Sistem *monitoring* yang kuat dan pelaporan berkala kepada publik juga harus diterapkan untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan sehingga tetap efektif dan relevan dalam mencapai tujuan publik. Secara ringkas lihat metrik pada Tabel 1.



Tabel 1. Perubahan Pendekatan Program Kesenjangan Sosial dan Kearifan Lokal

	Kegiatan Utama	Tujuan	Pihak Terlibat	Perubahan /modifikasi
1	<b>Identifikasi &amp; Perencanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi masalah sosial dan budaya.</li> <li>- Menyusun rencana program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami kebutuhan masyarakat.</li> <li>- Menyusun program yang sesuai dengan kearifan lokal.</li> </ul>	Pemerintah pusat dan Tim ahli Kementerian Sosial wajib melakukan <i>mapping</i> dan pembuatan <i>data base</i> desa potensi konflik
2	<b>Koordinasi &amp; Konsultasi</b>	Top down dan Penunjukan Langsung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan program selaras dengan budaya lokal.</li> <li>- Mendapatkan masukan dari masyarakat.</li> </ul>	Pemerintah pusat dan Tim ahli	Mulai Melihat Potensi <i>Stakeholders</i> Potensial
3	<b>Penganggaran &amp; Alokasi Dana</b>	Terbatas dan anggaran terkunci Memastikan ketersediaan dana. Dan efektif alokasi	Pemerintah pusat dan Tim ahli	Mulai dengan pendekatan alokasi yang sesuai kondisi faktual dengan pertimbangan tertentu
4	<b>Pelaksanaan Program</b>	Kementerian Sosial dan Tenaga Ahli Pendamping dan TA	Pemerintah pusat Tim ahli Mulai ada pelibatan masyarakat	Rangkul sebanyak mungkin <i>stakeholder</i> untuk terlibat
5	<b>Monitoring &amp; Evaluasi</b>	Belum ada Mekanisme yang sistematis pelaksanaan Program dan realisasi Fisik	Pemerintah pusat Tim ahli Mulai ada pelibatan masyarakat	Melibatkan seluruh aktor/ <i>stakeholders</i> yang terlibat
6	<b>Pelaporan &amp; Akuntabilitas</b>	Kurang Akuntabel/Transparan laporan prosedur dan bersifat formalitas	Pemerintah pusat Tim ahli Mulai ada pelibatan masyarakat	Berjenjang dan diarahkan kepada seluruh peserta dan penerima manfaat program
7	<b>Replikasi &amp; Pengembangan</b>	Cenderung reaktif dan kurang interaktif terkesan setelah program tidak ada upaya keberlanjutan	Pemerintah pusat Tim ahli Mulai ada pelibatan masyarakat	Dimulai dengan evaluasi periodik dan terintegrasi dengan <i>database</i> potensi manfaat program/ <i>feedback</i>



## Kendala dan Solusi

Program Keresasian Sosial dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan memerlukan pendekatan yang spesifik dan sesuai dengan konteks lokal di setiap daerah. Misalnya di Sumatra Barat, minimnya fasilitas olahraga dan terbatasnya interaksi sosial di kalangan pemuda menjadi kendala. Sementara itu di Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat kurang memahami manfaat jangka panjang dari pendopo sebagai ruang mediasi dan interaksi sosial. Di Banyumas, Jawa Tengah, pengelolaan fasilitas seperti lapangan futsal sering kali tidak direncanakan dengan baik setelah pembangunan selesai. Hambatan juga ditemui di Banten, di mana meskipun pembangunan sudah dilakukan, pemanfaatan dan optimalisasi sarana prasarana belum optimal. Demikian juga dengan di Probolinggo dan Cianjur. Berbagai hambatan dan tantangan tersebut pada akhirnya dapat ditemukan solusinya.

Tabel 2. Kendala dan Solusi Program Keresasian Sosial

Provinsi	Kendala	Solusi
<b>Sumatra Barat</b>	Kurangnya interaksi sosial pemuda pada forum Keresasian Sosial.	Aktifasi kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh forum Keresasian Sosial untuk menjalin interaksi antar warga.
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	Edukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari hasil program Keresasian Sosial.	Aktifasi forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat Program Keresasian Sosial.
<b>Jawa Tengah</b>	Pengelolaan fasilitas pasca pembangunan seperti lapangan futsal kurang direncanakan.	Penguatan pengorganisasian forum Keresasian Sosial.
<b>Banten</b>	Pengelolaan fasilitas pasca pembangunan seperti lapangan olah raga kurang direncanakan dengan baik.	Adanya pengelola yang aktif untuk membina dan mengedukasi secara langsung manfaat program Keresasian Sosial.
<b>Jawa Barat</b>	Kurangnya pemahaman tentang Tugas dan Fungsi Forum Keresasian Sosial.	Sosialisasi fungsi Forum Keresasian Sosial, dan kordinasi intensif dengan aparat desa.
<b>Jawa Timur</b>	Kendala kordinasi dengan stakeholders terkait.	Kolaborasi intensif antara Forum Keresasian Sosial, tokoh agama, dan aparat desa.

Program kearifan lokal di berbagai daerah pun menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari kualitas produk dan akses pasar hingga pemahaman masyarakat dan partisipasi generasi muda. Di Provinsi Sumatra Barat, misalnya, keberlanjutan usaha kecil terancam akibat rendahnya standar kualitas produk. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan lanjutan bagi para pelaku usaha kecil agar dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar.



Di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terdapat kekurangan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Upaya Ekonomi Produktif (UEP) dalam memperkuat ekonomi lokal. Solusi yang diusulkan adalah melalui pendampingan intensif dan *workshop* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Jawa Tengah, khususnya Banyumas, menghadapi tantangan dalam hal partisipasi generasi muda. Keterlibatan mereka dalam melestarikan budaya lokal masih terbatas. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk melibatkan pemuda dalam kegiatan seni budaya, misalnya melalui kompetisi dan pelatihan kreatif.

Solusi yang komprehensif dipandang perlu diterapkan dalam mengatasi Beragam kendala program kearifan lokal terutama di Lokasi kajian seperti pelatihan, pendampingan, pemetaan potensi pasar, dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana dalam Tabel 3.

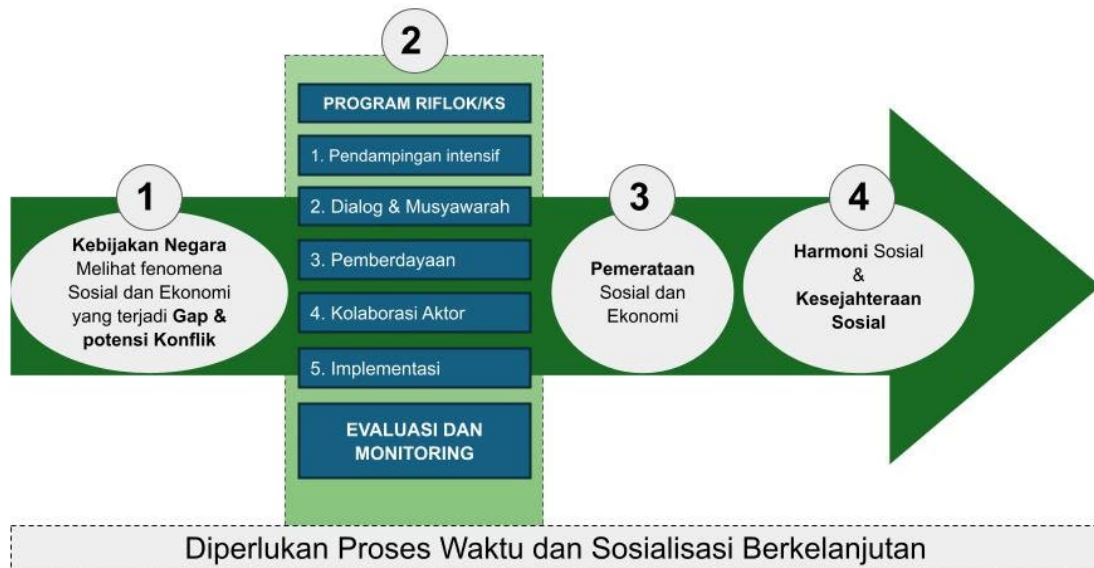
Tabel 3. Kendala dan Solusi Program Kearifan Lokal

Provinsi	Kendala	Solusi
Sumatra Barat	Kesinambungan usaha kecil sulit dipertahankan akibat rendahnya standar kualitas produk.	Pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas produk dan akses pasar.
Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemilihan anggota kelompok penerima manfaat program berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu konflik.	Musyawarah Pemilihan Anggota Kelompok.
Jawa Tengah	Keterbatasan partisipasi generasi muda dalam melestarikan budaya lokal.	Melibatkan pemuda dalam kegiatan seni budaya melalui kompetisi dan pelatihan kreatif.
Banten	Perlunya pemetaan potensi pasar yang lebih besar dan adanya produk unggulan dalam satu desa.	Peran aktif kelompok masyarakat dalam pengembangan pemasaran.
Jawa Barat	Persaingan dalam seleksi penerima manfaat, bantuan lebih berorientasi individu sehingga manfaat kolektif kurang terasa.	Arahkan bantuan ke kelompok masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, tingkatkan sosialisasi program.
Jawa timur	Keterbatasan modal usaha tambahan, kurangnya strategi pemasaran produk lokal, minimnya inovasi produk.	Peran aktif kelompok masyarakat dalam pengembangan pemasaran pemberian pelatihan pemasaran digital, diversifikasi produk lokal, perluasan jaringan pemasaran.



## Prospek ke Depan

Program Keserasian Sosial dan Program Kearifan Lokal ini masih layak untuk dipertahankan bahkan dilanjutkan dan jika memungkinkan untuk lebih dikembangkan, dengan alasan bahwa program ini nyata-nyata telah memberikan manfaat bagi Masyarakat (penerima manfaat). Namun, tentunya dengan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa catatan. Beberapa catatan terkait keberlanjutan Program Keserasian Sosial dan Program Kearifan Lokal tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Prospek Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal ke Depan

**Langkah pertama** diawali dengan penguatan fondasi kearifan lokal melalui pelibatan aktif tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin komunitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Forum-forum diskusi rutin dibentuk untuk memastikan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah mufakat tetap terpelihara. Sementara itu, dokumentasi praktik-praktik kearifan lokal dilaksanakan secara sistematis untuk mempertahankan relevansinya bagi generasi mendatang.

**Langkah kedua** perlu rencana aksi yang menjadi titik tumpu pertemuan kepentingan di masyarakat dengan esensi dasar program sehingga kohesi sosial peleburan kepentingan menjadi sebuah program yang terpadu dan dinamis

**langkah ketiga** berikutnya difokuskan pada pelaksanaan program-program yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan pembangunan modern. Program ini mencakup pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, program kesehatan masyarakat yang mempertimbangkan praktik lokal, dan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Tim koordinasi lintas sektor dibentuk untuk memastikan bahwa program-program tersebut terlaksana secara terpadu dan efektif, dengan sistem evaluasi bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Fitriyah et al., 2024).

**Langkah terakhir** menekankan pada edukasi dan penguatan kesadaran sosial melalui berbagai media, baik tradisional maupun modern (Wicaksono et al., 2024). Program pendampingan antargenerasi dilaksanakan untuk memudahkan proses transfer pengetahuan. Sementara itu, pelatihan kepemimpinan dan lokakarya pengelolaan konflik diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Sistem pemantauan partisipatif diterapkan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas utama sehingga dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan senantiasa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.



### ***Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal sebagai Prioritas Kebijakan***

Program kearifan lokal bertujuan untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas suatu komunitas, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan harmoni dalam hubungan sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai fondasi yang memperkuat ikatan antar warga dan menciptakan ketahanan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks kebijakan publik, penguatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan komunitas lokal dalam penyusunan hingga implementasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang dirancang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta memiliki dukungan penuh dari para pemangku kepentingan lokal. Keserasian sosial menjadi prioritas dalam kebijakan publik untuk menjaga stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat.

Program ini difokuskan pada upaya mencegah konflik sosial dan membangun rasa saling menghormati di antara kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, atau status sosial yang berbeda. Langkah-langkah seperti dialog komunitas, pelatihan resolusi konflik, dan mediasi berbasis kearifan lokal menjadi strategi utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan memprioritaskan inklusivitas, kebijakan ini memastikan bahwa semua kelompok, termasuk kelompok rentan, mendapatkan ruang untuk berkontribusi secara setara dalam pembangunan sosial.

### ***Sinergi dengan Kebijakan Publik Lainnya***

Agar lebih efektif, program kearifan lokal dan keserasian sosial perlu diselaraskan dengan kebijakan publik di sektor lain, seperti Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Partisipatif. Monitoring dan evaluasi merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan program kearifan lokal dan keserasian sosial. Proses ini harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas dan penilai utama efektivitas program sehingga memberikan wawasan langsung mengenai manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya evaluasi partisipatif, kebijakan dapat disesuaikan secara berkala untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, transparansi dalam evaluasi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.





# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## KESIMPULAN

Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal merupakan dua pendekatan strategis untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, mandiri, dan berdaya.

**Keserasian Sosial.** Program ini berhasil menciptakan ruang interaksi yang mendorong harmoni antar warga melalui pembangunan fasilitas publik seperti lapangan olahraga dan pendopo. Melalui dialog, mediasi, dan kegiatan kolektif, masyarakat dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan solidaritas sosial.

**Kearifan Lokal.** Dengan memanfaatkan tradisi dan potensi lokal, program ini memperkuat identitas budaya sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat. Usaha kecil berbasis lokal, seperti produksi makanan khas dan kerajinan, telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan mempererat hubungan antar warga.

## REKOMENDASI

### *Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan*

Strategi penguatan kapasitas masyarakat perlu diimplementasikan melalui sistem pendampingan berkelanjutan yang mencakup pelatihan reguler, *mentoring*, dan evaluasi kemajuan di seluruh lokasi program, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya setempat. Peningkatan kualitas produk lokal harus menjadi fokus utama melalui serangkaian intervensi terintegrasi yang meliputi pelatihan teknis produksi, standarisasi kualitas, pengembangan kemasan, *branding*, dan strategi pemasaran digital yang didukung oleh kemitraan strategis dengan sektor swasta dan *marketplace*. Akselerasi regenerasi pengelola program di tingkat masyarakat dapat dicapai melalui pemberdayaan generasi muda dalam berbagai program kreatif seperti pelatihan kewirausahaan digital, kompetisi inovasi budaya, dan festival kreatif yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan serta menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

### *Tata Kelola dan Pengawasan*

Pembentukan tim pengelola berbasis komunitas harus dilengkapi dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab yang terukur, serta peningkatan kapasitas dalam aspek manajemen fasilitas, pengelolaan keuangan, dan pengembangan program yang berkelanjutan. Implementasi sistem *monitoring* dan evaluasi perlu dirancang secara komprehensif dengan mengembangkan indikator kinerja yang terukur, mekanisme pengumpulan data yang sistematis, dan analisis dampak program yang dapat memberikan masukan konkret bagi penyempurnaan kebijakan dan



strategi implementasi ke depan. Pengelolaan bantuan sosial untuk program kearifan lokal harus dilakukan secara kolektif dan transparan melalui pembentukan kelompok pengelola yang akuntabel, pengembangan sistem administrasi yang terstandar, dan mekanisme pelaporan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### ***Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan***

Penguatan sinergi antara program keserasian sosial dan kearifan lokal perlu diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas umum untuk kegiatan promosi produk dan seni budaya lokal, pengembangan *calendar of event* yang terintegrasi, serta pembentukan forum koordinasi lintas program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti sektor swasta, universitas, dan lembaga masyarakat harus diformalkan melalui nota kesepahaman yang jelas, rencana aksi bersama yang terukur, dan mekanisme implementasi yang dapat membuka peluang pendanaan tambahan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Penguatan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan perlu diwujudkan melalui harmonisasi regulasi dan kebijakan, pengalokasian anggaran yang memadai, serta pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang dapat memastikan efektivitas implementasi program di lapangan.

### ***Pengembangan Pendanaan***

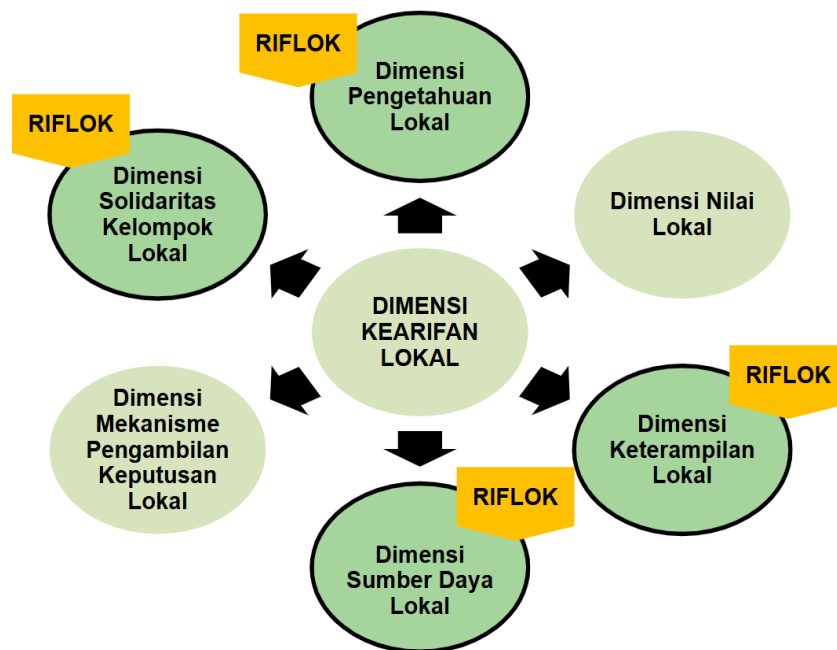
Pengembangan mekanisme *sharing budget* antara pemerintah daerah dan desa perlu dirumuskan secara detail melalui penyusunan regulasi pendukung, penetapan proporsi kontribusi yang jelas, dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk menjamin keberlanjutan pendanaan program jangka panjang. Sistem dokumentasi praktik terbaik dan model sukses program harus dikembangkan secara sistematis dengan membangun *database* yang komprehensif, menyusun panduan replikasi yang detail, dan mengembangkan mekanisme transfer pengetahuan yang efektif untuk memudahkan adopsi dan adaptasi program di daerah lain dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.



### Pengembangan Konsep Kearifan Lokal

Proses redefinisi konsep sosial budaya dalam konteks program kearifan lokal harus mempertimbangkan enam perspektif kearifan lokal secara holistik, meliputi aspek nilai-nilai tradisional, sistem pengetahuan lokal, praktik-praktik berkelanjutan, kelembagaan adat, kearifan dalam pengelolaan sumber daya, dan modalitas sosial yang dapat memperkuat kerangka kerja program secara komprehensif.

Dimensi Kearifan Lokal adalah inti dari upaya untuk menghidupkan kembali dan memperkuat nilai-nilai lokal yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dimensi ini menjadi dasar dalam penerapan program-program berbasis kearifan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing juga dampak program, khususnya Program Kearifan Lokal, dipandang perlu melakukan reorientasi bahkan redefinisi terkait diksi “Kearifan Lokal” itu sendiri. Reorientasi atau redefinisi Kearifan lokal bisa dilihat dalam Gambar 10.



Gambar 10. Reorientasi Konsep Bantuan Kearifan Lokal (Ife & Tesoriero 2008)

### Dimensi Pengetahuan Lokal

Pengetahuan lokal mencakup informasi, pengalaman, dan wawasan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Pengetahuan ini sering kali terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan praktik sosial yang beradaptasi dengan kondisi lokal.

***Dimensi Nilai - Nilai Tradisional***

Nilai-nilai tradisional mencerminkan norma, etika, dan kepercayaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dimensi ini menguatkan harmoni sosial dan memperkuat ikatan di antara warga.

***Dimensi Keterampilan Lokal***

Dimensi ini meliputi keahlian atau kemampuan khusus yang dimiliki oleh masyarakat setempat, seperti kerajinan tangan, seni, dan teknik pengelolaan sumber daya lokal yang spesifik dan khas.

***Dimensi Sumber Daya Lokal***

Sumber daya lokal mencakup potensi yang dimiliki oleh daerah setempat, baik berupa sumber daya alam, manusia, maupun budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

***Dimensi Praktik-Praktik Pengambilan Keputusan Lokal***

Dimensi ini berkaitan dengan cara masyarakat membuat keputusan secara kolektif berdasarkan musyawarah, mufakat, atau kebiasaan yang diwariskan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

***Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal***

Solidaritas kelompok lokal adalah aspek yang memperkuat kerja sama dan kebersamaan antarwarga. Dimensi ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan mendukung aktivitas-aktivitas kolektif. Keseluruhan dimensi ini terintegrasi dalam pendekatan program berbasis kearifan lokal, seperti dalam Reorientasi Bantuan Kearifan Lokal (*Riflok*), untuk memperkuat identitas dan keberdayaan masyarakat secara holistik.



# Daftar Pustaka

- Aldrich, D., & Meyer, M. (2014). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Alfirdaus, L., Manar, D., & Yuwono, T. (2021). Community resilience in urban plural context: Assessing challenges and strategies in times of Covid-19 pandemic. Dalam B. Prabawani, M. Rosyidin, Wijayanto. *Proceedings ICISPE 2020*. <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304764>
- Bennett, M., & Mook, L. (2022). Building social resilience through education: A community perspective. *Journal of Community Psychology*, 50(3), 1025–1040. DOI: 10.1002/jcop.22790.
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2012). High-value natural resources, development, and conflict: Channels of causation. In High-value natural resources and post-conflict peacebuilding (pp. 297–312). Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design* (5th ed.). SAGE Publications
- Fatmawati, & Dewantara, J. A. (2022). Social resilience of indigenous community on the border: Belief and confidence in anticipating the spread of covid-19 through the Besamsam custom in the Dayak community. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 32(6), 1216–1233. <https://doi.org/10.1002/casp.2611>
- Fischer, J., & Kauffman, M. (2021). Economic empowerment as a tool for social resilience. *International Journal of Social Economics*, 48(4), 553–569. DOI: 10.1108/IJSE-09-2020-0535.
- Fisher, R., & Ury, W. (1991). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Penguin Books
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage Publications.
- Hillesund, S., Bahgat, K., Barrett, G., Dupuy, K., Gates, S., Nygård, H. M., ... & Østby, G. (2018). Horizontal inequality and armed conflict: A comprehensive literature review. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement*, 39(4), 463–480.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka.
- Jäkel, C., & Giebler, H. (2022). Conflict prevention and social cohesion: A review of current approaches. *Journal of Peace Research*, 59(2), 231–245. DOI: 10.1177/00223433211062012.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.”
- Kumar, A. K. (2022). *Equity and inclusive growth from a development perspective*.
- Laborda, L., Easdale, M., Fallot, A., Ocariz, M., & Tittonell, P. (2023). Rise from the ashes! Resilience patterns in patagonia pastoralist communities. *Sustainable Development*, 32(2), 1428–1445. <https://doi.org/10.1002/sd.2679>
- Lederach, J. P. (1995). *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures*. United States Institute of Peace Press.
- Miall, H. (2021). The role of economic development in conflict prevention. *Conflict Resolution Quarterly*, 38(4), 345–362. DOI: 10.1002/crq.21305.
- Mujiyadi, B., R. Irmayani, N., Habibullah, H., Erwinsyah, R., & Nurhayu, N. (2023). Reformulation of socially resilient village. *Proceedings of the 3rd International Conference on Rural Socio-Economic Transformation: A Transdisciplinary Approach for Promot*. Dalam A. Helmi, A. H. Dharmawan, & R. A. Kinseng, *Proceedings RUSSET 2022*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2338865>
- Murray, M., & Kearns, A. (2023). Community participation and social resilience: lessons from recent crises. *Journal of*



- Social Issues*, 79(1), 45–62. DOI: 10.1111/josi.12456.
- Nava, M. (2023). Advancing shared accountability for meaningful community engagement with socially vulnerable communities: Lessons learned from Covid-19 health education and general outreach in an urban region. *TSW*, 1(1). <https://doi.org/10.55016/ojs/tsw.v1i1.77548>
- Fitriyah, N., Yuniarti, T., Wahyono, E., Prayoga, R.A., Fatriani, R.M., Wicaksono, A., Setram, N., Juniati, H., Wijaya, G., Nuraini, L. (2024). Clean water issues, community behavior and communication models in sustainable development goals 6 in Banten West Java Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(1), 247–258. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190123>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (Ed. 7th). Pearson Education Limited.
- Pandey, V., Kumar, S., Gupta, S., & Khatri, N. (2024). Unlocking sustainability: prioritizing barriers for SME success in India with AHP analysis. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 14(1), 25.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial.
- Permana, O. D., Rusyidi, B., & Kharisma, D. (2024). Analisis biaya manfaat program keserasian sosial sebagai upaya penanganan konflik sosial di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 42–49.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Saefudin, A. (2023). History, cultural shifts, and adaptation in social change: An Ethnographic study in the Aboge islamic community. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 4(2), 303–310. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v4i2.596>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Susantyo, B. (2007). *Community development dalam praktik pekerjaan sosial*. STKS Press.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Valizadeh, N., Ghazani, E., Akbari, M., & Shekarkhah, J. (2022). How do collective efficiency and norms influence the social resilience of Iranian villagers against the Covid-19? The mediating role of social leadership. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.861325>
- Varshney, A. (1993). Self-limited empowerment: Democracy, economic development and rural India. *The Journal of Development Studies*, 29(4), 177–215.
- Wicaksono, A., Wahyono, E., Wijaya, G., Prayoga, R., Prihatin, S., Purbawa, Y., Sidipurwanti, E., Juniati, H., Sakti, T., & Humaedi, M. (2024). Dynamic implementation of land registration acceleration through community participation: A case study in Banjar District, South Kalimantan Province. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), 5246. doi: <http://dx.doi.org/10.24294/jipd.v8i7.5246>
- Zuñiga, R., & Villoria, R. (2019). Social participation strategies and resilience in Mexican population affected by the 2017 earthquakes. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 14(3), 335–342. <https://doi.org/10.1017/dmp.2019.59>





Kombinasi Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menciptakan harmoni sosial, melestarikan budaya, dan memberdayakan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dengan dukungan semua pihak dan pengelolaan yang baik, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi model keberhasilan pembangunan ketahanan sosial di Indonesia. Perpaduan pelaksanaan Program Keserasian Sosial dan Program Kearifan Lokal di Indonesia, melahirkan harmoni dan kolaborasi masyarakat dalam kedua program tersebut.

BRIN Publishing  
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:  
**Penerbit BRIN**, anggota Ikapi  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,  
Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kota Jakarta Pusat 10340  
*E-mail:* [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
*Website:* [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)

DOI: 10.55981/brin.1861

